

TPID Kota Bogor Kendalikan Inflasi dari Lahan Tidur

BOGOR (IM)- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor yang dipimpin Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah melakukan upaya pengendalian inflasi dilakukan bersama petani cabai mandiri.

Upaya yang dilakukan TPID Kota Bogor untuk mengendalikan laju inflasi itu dengan cara melakukan panen bersama cabai merah besar dan cabai merah keriting lahan pertanian perkotaan berlokasi di jalan Guru Muchtar, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara.

“Ya, upaya pengendalian inflasi dilakukan bukan saja melalui program TPID pemerintah pusat dan provinsi, tapi juga oleh Pemkot Bogor yang secara rutin melakukan gerakan bazar murah ataupun gerakan pangan murah. Dalam upaya menurunkan inflasi daerah Kota Bogor juga bekerjasama dengan daerah produsen penghasil tanaman pangan,” kata Syarifah, Jumat (5/1).

Syarifah memaparkan, namun yang menjadi tantangan adalah ketika daerah produsen mengalami masalah serangan hama sehingga membuat berkurangnya produksi yang juga mendorong lonjakan harga. “Nah, salah satu upaya mengendalikannya

adalah dengan menanam, kenapa harus menanam, karena jika tidak menanam maka akan bergantung pada daerah produsen. Jadi kalau daerah produsen barangnya terbatas, harga jualnya mahal dan kami tidak punya harga tandingannya kalau daerah-daerah produsen ini terserang hama. Makanya kami harus punya cadangan-cadangan seperti ini pertanian di lahan perkotaan,” jelas Syarifah.

Ia menjelaskan, Kota Bogor yang pendapatannya ditunjang oleh sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) membuat pertumbuhan hotel, restoran dan cafe (Horeca) berkembang, sehingga lanjut Sekda, kebutuhan bahan pangan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat tapi juga Horeca.

“Dengan adanya pertanian di lahan perkotaan, yang juga terus didorong Pemkot Bogor, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bisa membantu produktivitas bahan pangan dan juga menjadi pemasukan tambahan bagi masyarakat,” jelasnya. ● **pra**

PERKUAT LAYANAN KESEHATAN

Lapas Cibinong Jalin Kerja Sama dengan RSUD Cibinong

CIBINONG (IM)- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani meneken perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong bertempat di Aula Cendrawasih RSUD Cibinong, Kamis (4/1). Perjanjian kerja sama ini terkait dengan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas Cibinong.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Lapas Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dengan Direktur RSUD Cibinong, Yukie Meistisia Anandaputri Satoto. Wisnu mengatakan, Ini merupakan bentuk komitmen dari Lapas Cibinong dalam rangka pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-32/PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA serta arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat R. Andika Dwi Prasetya untuk bekerja sama dan meningkatkan sinergitas antar instansi.

“Kegiatan ini merupakan

momentum kerja sama yang baik yang dilandasi dengan kepedulian yang besar terhadap kesehatan warga binaan. Kegiatan pembinaan dan pengamanan di Lapas Cibinong akan berjalan dengan baik dan kondusif apabila kesehatan warga binaan terjamin,” ujar Wisnu lewat keترangan yang diterima, Jumat (5/1).

Wisnu juga menjelaskan bahwa kondisi layanan kesehatan Lapas Cibinong masih membutuhkan bantuan. Untuk itu melalui kerja sama ini diharapkan dapat membantu layanan kesehatan di Lapas Cibinong menjadi lebih optimal.

“Warga binaan di Lapas merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit ataupun menularkan penyakit. Sehingga diperlukan bantuan pemeriksaan, pengobatan dan edukasi tentang kesehatan kepada Warga Binaan,” ungkap Wisnu.

Pada kesempatan ini, Yukie menyatakan kesiapannya bersama dengan jajaran untuk melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Warga Binaan Lapas Cibinong. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENYESUAIAN JADWAL DAMPAK KECELAKAAN KERETA COMMUTERLINE

Sejumlah penumpang duduk di ruang tunggu pintu kereta lokal Stasiun Bandung, Bandung, Jabar, Jumat (5/1). PT. KAI melakukan penyesuaian jadwal dan pengalihan tujuan jalur selatan hanya sampai di Stasiun Rancaekek untuk penumpang kereta yang terdampak kecelakaan antara kereta KA Turangga dan keret Commuterline Bandung Raya.

Warga Sentul City Ingatkan Pj Bupati Bogor Terkait SPAM dan PSU

Warga berharap, Pj Bupati Bogor menjalankan tugasnya dengan baik, menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya yang dialami warga Kawasan Perumahan Sentul City, memenuhi hak warga serta tidak terpengaruh pendekatan pengembang untuk tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan.

BOGOR (IM)- Komite Warga Sentul City (KWSC) selaku penghuni Kawasan Perumahan Sentul City mengingatkan bahwa ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pj Bupati Bogor khususnya di Kawasan Perumahan Sentul City.

Pekerjaan rumah tersebut di antaranya terkait penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum

(SPAM) oleh Perumdam Tirta Kahuripan Bogor yang masih belum maksimal dan belum dilaksanakannya putusan pengadilan terkait serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Meskipun berada di kawasan perumahan elit, warga Kawasan Perumahan Sentul City masih sering mengalami gangguan SPAM, seperti air tidak mengalir berhari-hari atau tekanan air sangat rendah. Meskipun demikian

tagihan air tetap normal bahkan membengkak meskipun air sering tidak mengalir.

“Selain itu, hingga saat ini Pembak Bogor masih belum mengambil alih PSU di Kawasan Perumahan Sentul City. Pasalnya dalam rapat monitoring pada tanggal 7 September 2020, Satuan Tugas V Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi peringatan kepada Bupati Bogor karena tidak serius dalam proses serah terima PSU. Setidaknya tercatat sebanyak 75% atau 627 dari total 833 perumahan belum melakukan serah terima PSU di wilayah Kabupaten Bogor.

Hal tersebut juga semakin dipertegas dengan sikap Bupati sebelumnya yang tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 51/G/TF/2022/PTUN. Bdg, tertanggal 15 Novem-

ber 2022 (Putusan PSU).

Hal mana Putusan PSU tersebut secara tegas menghukum Bupati Bogor untuk mengelola, membina dan mengawasi penyerahan PSU di Kawasan Perumahan Sentul City,” ujar Ketua KWSC Aswul Asrol kepada wartawan, Jumat (5/1).

Aswul Asrol menuturkan dengan tidak diambilnya PSU di Kawasan Perumahan Sentul City menimbulkan masalah bagi warga.

Warga merasa dirugikan dengan kualitas PSU yang tidak memenuhi standar, seperti jalan rusak, penyerangan jalan umum padam, penyalahgunaan peruntukan PSU. Selain itu, jika ada keluhan terkait pengelolaan PSU seperti permasalahan jaringan Listrik, warga dipaksa untuk berurusan dengan Pengembang.

“Belum selesainya permasalahan tersebut, membuat warga Kawasan

Perumahan Sentul City merasa Pemerintah Kabupaten Bogor belum hadir sepenuhnya untuk melayani warga. Warga merasakan ketidakpastian hukum karena masih harus berurusan dengan pengembang untuk menikmati haknya,” tuturnya.

Dengan kepemimpinan Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang baru diharapkan membawa harapan baru bagi warga Kabupaten Bogor.

“Kami berharap Pj Bupati Bogor menjalankan tugasnya dengan baik, menyelesaikan permasalahan khususnya yang dialami warga Kawasan Perumahan Sentul City, memenuhi hak warga serta tidak terpengaruh pendekatan pengembang untuk tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan,” lanjut Aswul Asrol. ● **gio**



IDN/ANTARA

RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

Sejumlah anak bermain di taman Alun-alun Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar, Jumat (5/1). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong setiap daerah memiliki ruang bermain ramah anak untuk memenuhi hak anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tanah Longsor Berdampak pada 138 Keluarga di Desa Sukamulya Purwakarta

PURWAKARTA (IM)- Hujan deras menyebabkan tanah longsor yang berdampak pada 138 keluarga yang terdiri atas 468 jiwa di Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalaru, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (4/1).

“Lokasi longsor tepat berada di kaki Gunung Anaga, wilayah Kecamatan Tegalaru,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta, Heryadi Erlan saat dihubungi di Purwakarta, Jumat (5/1).

Ia mengatakan bahwa warga yang rumahnya terdampak tanah longsor mengungsi di halaman Sekolah Dasar Negeri 2 Sukamulya atau rumah saudara dan kerabat.

Menurut dia, ada 94 keluarga yang mengungsi ke rumah kerabat karena rumahnya terdampak tanah longsor.

BPBD Kabupaten Purwakarta sudah menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi bencana untuk membantu warga yang terdampak tanah longsor.

“Setelah ada laporan, kita langsung merespons dan langsung menerjunkan anggota ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan lebih lanjut,” kata Erlan.

Menurut dia, BPBD juga telah mendistribusikan bantuan makanan kepada warga yang rumahnya terdampak tanah longsor di Desa Sukamulya. Dia menyampaikan bahwa daerah di sekitar kaki Gunung Anaga tergolong rawan mengalami pergerakan tanah. “Saat ini, cuaca ekstrem, curah hujan intensitasnya sangat tinggi, sehingga warga di kampung ini perlu dievakuasi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan,” katanya. ● **pra**

Menteri PUPR Tinjau SMAN 1 Sumedang Terdampak Gempa

BANDUNG (IM)- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Wahyu Mijaya bersama Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti meninjau SMAN 1 Sumedang, salah satu sekolah terdampak gempa, Rabu (3/1).

Dalam tinjauan tersebut, Basuki menyampaikan, pihaknya akan menurunkan tim komite untuk menilai mengenai layak fungsi gedung (bagian) mana yang bisa digunakan dan tidak. “SMA Negeri 1 Sumedang menjadi prioritas yang harus segera ditangani pascagempa,” ujarnya.

Kadisdik pun menyambut baik upaya Kementerian PUPR yang bergerak cepat menangani beberapa sekolah di Sumedang yang terdampak gempa pada 31

Desember lalu.

“Alhamdulillah, Menteri PUPR sudah meninjau lokasi sekolah dan melihat langsung kondisinya. Sudah kita sampaikan pula bahwa pada 8 Januari ini sekolah sudah mulai beraktivitas,” tutur Kadisdik.

Pak Menteri pun, lanjutnya, sebelum tanggal tersebut, sudah mengeluarkan layak fungsi bagian mana yang bisa digunakan dan tidak digunakan. “Terkait penyelesaian kerusakan, kita tunggu kebijakan lebih lanjut. Pada prinsipnya, jika akibat bencana, itu memang bagian dari tanggung jawab PUPR. Kita akan menunggu kebijakan lebih lanjut seperti apa. Insha Allah, semua mendapat yang terbaik,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala SMAN 1 Sumedang, Odang Kusyana menjelaskan, ruangan yang terkena pascagempa ada 18 ruang kelas, ditambah 4 labo-

ratorium, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang wakasek, ruang guru, ruang meeting, dan ruang ekstrakurikuler kesenian.

“Kalau dijumlahkan, ruangan yang terkena pascagempa yang retak ringan, biasa, dan agak parah ada 32 ruangan,” jelasnya.

Ia pun berharap, dengan hadirnya Pak Menteri, Bu Dirjen, Kadisdik, dan Kepala KCD VIII bisa secepatnya menangani dan memperbaiki ruangan-ruangan yang rusak karena sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Karena, banyak orang tua siswa yang menanyakan bagaimana keberlangsungan KBM,” pungkasnya.

Selain meninjau SMAN 1 Sumedang, Menteri PUPR pun meninjau RSUD Sumedang yang juga menjadi prioritas penanganan pascagempa. ● **lys**



IST

Kadisdik Jabar, Wahyu Mijaya mendampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti meninjau SMAN 1 Sumedang, salah satu sekolah terdampak gempa, Rabu (3/1).

Pemkab Bekasi Anggarkan Rp20 Miliar Bebaskan Lahan Perluasan RSUD di Cibitung

KAB. BEKASI (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembiayaan pembebasan lahan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jalan Raya Teuku Umar 202, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengatakan pagu anggaran dimaksud diperuntukkan bagi pembebasan lahan tahap pertama tahun ini.

“Jadi bertahap ya. Untuk tahap awal mudah-mudahan Juli sampai Agustus nanti sudah tuntas terbayar semua. Rencana tahun 2025 dianggarkan kembali untuk tahap lanjutan,” katanya di Cikarang, Jumat (5/1).

Pihaknya masih menunggu hasil penghitungan dari tim penaksir harga tanah atau appraisal yang akan dibebaskan pada tahap pertama tahun ini.

“Semoga apa yang telah direncanakan berjalan lancar dengan hasil optimal, terlebih perluasan area RSUD Kabupaten Bekasi ini menjadi salah satu solusi untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penambahan kapasitas fasilitas rumah sakit itu sendiri,” ucapnya.

Wakil Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Lilah Muflihah mengatakan perluasan lahan berikut penambahan sarana dan prasarana gedung untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

RSUD Kabupaten Bekasi memiliki luas 2,4 hektare dengan 280 tempat tidur pasien. Padahal rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI, kata dia, rumah sakit

tipe B sedikitnya membutuhkan 4-5 hektare serta berkapasitas lebih dari 300 tempat tidur.

“Oleh karena itu kami sudah mengajukan perluasan lahan. Kalau kita lihat dari luas rumah sakit tipe B dengan pendidikan, rumah sakit di Kota Bekasi sudah 5-7 hektare, itu pun tipenya sama dengan kami. Kemudian di Sukabumi sekitar tujuh hektare, di Karawang 12 hektare, tetapi RSUD Kabupaten Bekasi hanya seluas 2,4 hektare,” katanya.

Menurut dia, Kondisi ruang perawatan di rumah sakit milik pemerintah daerah ini belakangan kerap penuh.

“Walaupun pasien tahu ruang ICU itu penuh, namun karena kepercayaan pasien kepada RSUD Kabupaten Bekasi itu sudah tinggi sehingga pasien banyak yang tetap datang dan dirawat di rumah sakit ini,” katanya.

Lilah mengaku penambahan sarana dan prasarana juga akan dilakukan setelah proses perluasan lahan tuntas, termasuk rencana membangun poliklinik terpadu satu pintu.

“Setelah diperluas, RSUD Kabupaten Bekasi berencana akan membuat poliklinik satu pintu kemudian juga ruang unit jantung terpadu. Unit ini khusus memfasilitasi pasien jantung untuk pemasangan ring, jadi di situ ada ruang catlab, lalu ada juga ruang ICU, dan ada ruang pemulihan sampai pasien pulih,” ucapnya.

“Kemungkinan di tahun 2026 baru ada pembangunan. Jadi sampai tahun 2025 rencana dilakukan pembebasan lahan. Mengingat lahan yang akan dibebaskan juga cukup luas dan harganya pun lumayan mahal dengan lahan posisi di pinggir jalan utama,” ucapnya. ● **pp**